

Judul : Koordinasi Pemda-BGN: MBG diharapkan nihil kecelakaan
Tanggal : Minggu, 07 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Koordinasi Pemda-BGN

MBG Diharapkan Nihil Kecelakaan

PEMERINTAH mengimple-
mentasikan Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 115 Tahun
2025 tentang Tata Kelola Makan
Bergizi Gratis (MBG). Tata
kelola program unggulan itu
disempurnakan dengan harapan
akan zero accident bisa tercapai.

Anggota Komisi IX DPR
Irma Suryani Chaniago menga-
takan, salah satu fokus utama
dalam regulasi itu adalah penam-
bahan Unit Pelaksana Teknis
Badan Gizi Nasional (UPT
BGN), berupa Kantor Pelayanan
Pemenuhan Gizi (KPPG) di
daerah. "KPPG bisa memenuhi
kebutuhan ahli gizi dan menga-
wasi kinerja satgas MBG,"
ujarnya, kemarin.

Karena program MBG berja-
lan setiap hari, maka butuh pe-
ngawasan melekat, agar semua
prasyarat untuk tidak terjadinya
keracunan bisa sesuai target.
Selanjutnya, BGN harus men-
cari solusi agar bisa memenuhi
ketersediaan ahli gizi di setiap
SPPG yang saat ini masih jadi
tantangan karena akses yang be-
lum merata, terutama di pelosok.

Irma meyakini, jika seluruh
proses dijalankan sesuai SOP
dan ketentuan hasil RDP antara
DPR dengan BGN serta Ke-

menkes terkait gizi dan sanitasi,
maka implementasinya akan
lebih optimal. Pasalnya, lem-
baga lain seperti Kemendagri
sudah berkomitmen untuk mem-
bantu distribusi ke PAUD, ibu
hamil, dan balita, serta BPOM
terkait pangan aman. "Jika itu
semua bisa dijalankan, Insya
Allah target zero accident dapat
dicapai," tandasnya.

Anggota Komisi IX Edy Wur-
yanto menambahkan, Pemerin-
tah Pusat dan Daerah wajib
memahami perannya masing-
masing secara jelas. Perpres
115/2025 adalah langkah besar,
tapi sukses atau tidaknya pro-
gram ini, tetap bergantung pada
kesiapan teknis di lapangan.

Menurutnya, harus ada kepa-
sitan bahwa percepatan pem-
angunan Satuan Pelayanan
Pemenuhan Gizi (SPPG), penga-
daan bahan baku dari koperasi,
dan penetapan standar higienitas
berjalan. Regulasi ini telah
memuat sejumlah hal terkait
untuk menyempurnakan tata
kelola program ini.

Soal bahan baku, disebutkan
bahwa asalnya harus dari Kope-
rasi Desa, BUMDes, UMKM,
atau usaha dagang lain, agar bisa
menggerakkan perekonomian



Irma Suryani

rakyat. Edy setuju dengan norma
itu, dan mendorong penguatan
rantai pasok lokal untuk men-
dukung dapur SPPG. Karena
itu sejalan dengan tujuan MBG
untuk mendorong pemerataan
ekonomi daerah.

Selama ini, lanjutnya, pening-
katan kebutuhan bahan baku
akibat SPPG tidak diimbangi
suplai yang memadai. Karena
itu, koordinasi antara Pem-
da dan BGN menjadi sangat
krusial. BGN tahu kebutuhan
SPPG, sementara Pemda tahu
kapasitas suplai di wilayahnya.
"Keduanya harus duduk ber-
sama memetakan sumber bahan
baku dan menghubungkannya

langsung dengan SPPG," tegas
legislator Fraksi PDIP itu.

Untuk memenuhi poin itu,
solusi paling strategis saat ini
adalah mendorong adanya Nota
Kesepahaman (MoU) antara
SPPG dan kelompok tani, pe-
ternak, nelayan, serta supplier
lokal yang difasilitasi Pemda.
Pasalnya, BGN belum tentu bisa
mengatur supply secara optimal
tanpa peran Pemda.

Poin penting selanjutnya
adalah soal peran strategis ahli
gizi dalam SPPG, terutama
terkait keamanan dan kualitas
makanan. Disebutkan, dapur
wajib memiliki ahli gizi, tapi
karena keterbatasan yang ada
saat ini, ahli gizi di SPPG bisa
berasal dari sarjana kesehatan
masyarakat, sarjana teknologi
pangan, hingga sarjana keaman-
an pangan.

Edy mengingatkan, ahli gizi
adalah profesi kesehatan UU
Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan menyebut, tiap pro-
fesi kesehatan harus bekerja
sesuai kewenangan dan kompe-
tensinya. Ahli gizi adalah satu-
satunya tenaga kesehatan den-
gan kompetensi penuh dalam pe-
nyelenggaraan makanan bergizi.

Dengan norma baru dalam

menjalankan Program MBG,
Edy berharap program ini bisa
jadi pedoman bagi penyeleng-
gara. Program unggulan ini ha-
rus ditopang oleh banyak pihak.
Tujuannya, agar program yang
memakan cukup besar anggaran
Pemerintah ini dapat dirasakan
masyarakat dengan lebih baik.

Sebelumnya, Rabu (3/12/2025)
Pemerintah menggelar rapat
koordinasi perdana sebagai pe-
nanda dimulainya implementasi
Perpres 115/2025. Menko Pan-
gan Zulkifli Hasan menjelaskan,
perpres itu mempertegas ber-
bagai aspek tata kelola, termasuk
kewajiban penggunaan bahan
baku dari koperasi sebagai ba-
gian dari integrasi rantai pasok.

Selain itu, Pemerintah juga
menyiapkan 13 regulasi turunan
yang mencakup percepatan Ser-
tifikat Laik Higiene dan Sani-
tasi (SLHS), pemenuhan tenaga
ahli gizi, hingga pembangunan
SPPG di wilayah 3T. BGN mel-
aporkan, 8.200 SPPG sedang
atau akan dibangun di daerah
terpencil.

"Beberapa langkah lanjutan
akan segera dijalankan, salah
satunya sosialisasi masif di
tingkat pusat dan daerah," ujar
Zulkifli. ■ PYB